



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 28 April 2025

Halaman: 3

Utd, Hubbert Hahn, Jumat (25/4) di Kim's Bar and Kitchen kopi di Indonesia, akhirnya mereka ki menggunakan 100% produk kopi gafredo di Indonesia akan memiliki butannya. (ard/ord)

Jangan Ada Tindakan Intimidatif

Legislatif Minta Jalur Musyawarah Tuntaskan Persoalan Penataan Stasiun Lempuyangan

YOGYA, TRIBUN - Belasan warga terdampak proyek pengembangan kawasan Stasiun Lempuyangan, mengadu ke DPRD Kota Yogya, Jumat (25/4). Pertemuan dengan kalangan legislatif tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan keresahan karena hunian yang selama ini mereka tempati terancam digusur.

Untuk diketahui, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta berencana melakukan penataan kawasan emplasemen Stasiun Lempuyangan. Menurut PT KAI, kawasan yang ditata mencakup 13 rumah dinas milik perusahaan yang menjadi asetnya. KAI menyebut lahan tersebut merupakan tanah milik Keraton Yogya (Sultan Ground/SG) yang telah diserahkan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

Namun, rencana penataan tersebut memicu penolakan dari warga setempat. Warga menyatakan tidak pernah mendapat sosialisasi yang memadai dan khawatir akan kehilangan tempat tinggal yang telah mereka huni selama puluhan tahun.

Ketua RW 01 Bausasaran, Danurejan, Antonius Handjotomo, mengatakan bahwa keresahan warga sudah dirasakan sejak 13 Maret 2025 silam. Saat itu, pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengirimkan undangan sosialisasi terkait pelaksanaan proyek pengembangan kawasan Stasiun Lempuyangan.

"Saat menyampaikan undangan, pihak KAI datang bersama Polsuska. Kami merasa terintimidasi. Apalagi, itu sangat mendesak, undangan baru disampaikan H-1," kata Anton di Gedung Dewan.

Akhirnya, sosialisasi baru terlaksana pada 26 Maret 2025 di Kantor Kelurahan Bausasaran, di mana PT KAI menyampaikan bakal menata sisi selatan Stasiun Lempuyangan dengan konsep beautifikasi. Dampaknya, 14 rumah warga di kawasan tersebut bakal digusur, untuk dibangun sebuah unit perkantoran guna menunjang keperluan PT KAI.

"Padahal, seluruh warga (terdampak proyek) juga sudah mengantongi Surat Keterangan Tanah (SKT) sejak lima tahun yang lalu," ucap Anton.

Sehingga, dalih pengusuran karena PT KAI merasa telah mengantongi *politik* dari pihak Keraton Yogya untuk memproses kekancingan tanah SG pun tak dapat diterimanya. Terlebih, *politik* itu ternyata baru diterima oleh PT KAI pada Oktober 2024, serta diikuti izin sementara yang bakal berakhir Oktober 2025 mendatang.

"SKT yang kami pegang ini resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang juga akan digunakan untuk memproses kekancingan," cetusnya.

Ketua DPRD Kota Yogya, Wisnu Sabdono Putro, yang menerima aduan warga, menegaskan antensinya untuk menindaklanjuti polemik, agar tidak ada potensi intimidasi dan sebagainya selama proses bergulir. Terlebih, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X tempo hari sudah berpesan, agar permasalahan dapat diselesaikan lewat jalur musyawarah dan mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat.

"Supaya lebih fokus, kami meminta untuk ditindaklanjuti oleh Komisi A. Segera undang berbagai pihak, PT KAI juga kalau perlu. Kami akan ikut mengawal, agar jangan sampai ada tindakan intimidatif," terang politikus PDI Perjuangan itu.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya, Indaruwanto Eko Cahyono, menambahkan, pihaknya akan meminta keterangan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) sebagai langkah awal. Menurutnya, persoalan harus ditelisik dari aspek administratif, mengingat keresahan serupa juga dialami oleh warga lain hingga wilayah Bacro.

"Informasinya kan SKT untuk memproses surat kekancingan penggunaan tanah SG juga sudah dipengang warga," pungkasnya. (aka)

KERESAHAN MASYARAKAT

- Belasan warga terdampak proyek pengembangan kawasan Stasiun Lempuyangan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengadu ke DPRD Kota Yogya, Jumat (25/4).
- Pertemuan dengan kalangan legislatif tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan keresahan karena hunian yang selama ini mereka tempati terancam digusur.
- Legislatif bakal segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk PT KAI, untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005